

**SANKSI HUKUM PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL (*KEBIRI*)
TERHADAP ANAK MENURUT PERPU NO 1 TAHUN 2016
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Tinjauan Analisis LPA Kota Medan dan Hukum Pidana Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

OLEH

RIZKY ADELIA
NIM: 0205162066



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M**

PERSETUJUAN

**SANKSI HUKUM PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL (*KEBIRI*)
TERHADAP ANAK MENURUT PERPU NO 1 TAHUN 2016
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Tinjauan Analisis LPA Kota Medan dan Hukum Pidana Islam)**

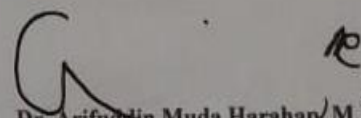
Oleh :

RIZKY ADELIA
NIM: 0205162066

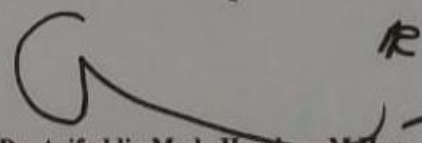
Pembimbing I


M. Rizal, M.Hum
NIP. 196507161994031003

Pembimbing II


Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 198108282009011011

Mengetahui:
Ketua Jurusan Jinayah (Hukum Pidana Islam)
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan


Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 198108282009011011

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizky Adelia
Nim : 0205162066
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana
Islam
Judul Skripsi : Sanksi Hukum Pelaku Kejahatan Seksual
(Kebiri) Terhadap Anak Menurut Perpu No 1 Tahun 2016
Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Analisis LPA
Kota Medan dan Hukum Pidana Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul diatas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya Bapak/ Ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, 3 November 2020,
Yang membuat pernyataan,

Rp.6000

Rizky Adelia
NIM: 0205162066

IKHTISAR

SANKSI HUKUM PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL (*KEBIRI*) TERHADAP ANAK MENURUT PERPU NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (TINJAUAN ANALISIS LPA KOTA MEDAN DAN HUKUM PIDANA ISLAM). Penelitian merupakan penelitian hukum pidana Islam terkait tentang hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia yang di atur pada Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu tentang Perlindungan Anak. Adapun rumusan masalah bagaimana ketentuan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak menurut Perpu No.1 tahun 2016 dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap Perpu No.1 tahun 2016 tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak serta bagaimana pandangan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Medan terhadap Perpu No.1 tahun 2016 tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data, baik yang primer maupun yang sekunder. Data-data tersebut akan ditelusuri dalam literatur yang dipandang relevan. Setelah penulis meneliti dan menganalisa, penulis mengambil kesimpulan bahwa penerapan untuk kebiri tercantum dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 November 2016. Adapun perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Pedofilia) yaitu ketentuan Pasal 81 ayat 7 yaitu: Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Selanjutnya hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah mengesahkan PerpuNo.1Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri yang dalam hal ini tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugrah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam peneliti hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan contoh suri tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi ini berjudul "*Sanksi Hukum Pelaku Kejahatan Seksual (Kebiri) Terhadap Anak Menurut PERPU No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Analisis LPA Kota Medan dan Hukum Pidana Islam)*" dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) di fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan

skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prpf, Dr, KH Saidurrahman M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr, Zulham, S.HI, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan dan Bapak Drs, Ishaq, MA. Selaku Sekertaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti selama perkuliahan. Sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik.
4. Kepada bapak Pembimbing Akademik I dan II yang telah banyak membantu dalam mengarahkan dan membimbing peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
5. Teristimewa kepada ayahanda dan Ibunda yang telah tulus dan sabar membesarkan, membiayai serta mendoakan setiap saat selama peneliti menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan gelar Sarjana di UIN Sumatera Utara Medan. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, kasih sayang dan karuni-Nya yang tidak pernah putus kepada keduanya baik di dunia dan di akhirat, dan semoga bisa membuat keduanya

bangga terutama bisa membuat alm ayah bangga di alam sana.

6. Kepada saudara dan family yang telah memberikan dukungan baik materil dan moril kepada peneliti.

Peneliti telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi tata bahasa, penelitian, maupun yang lainnya, untuk itu peneliti sangat berterima kasih, apabila ada masukan maupun kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam dunia pendidikan kedepan dan untuk pendidikan yang lebih baik.

Peneliti

RIZKY ADELIA
NIM: 0205162066

DAFTAR ISI

	Hal
PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Batasan Istilah	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II KAJIAN PUSTAKA KEBIRI SEBAGI BENTUK HUKUMAN	
A. Hukum Pidana Islam	18
B. Hukuman Kebiri dalam Prespektif Fiqih Jinayah	25
 BAB III TEORI HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK	
A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Hukum Islam	34
B. Macam-Macam Kekerasan Seksual terhadap Anak	39
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pedofilia	42
D. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Ketentuan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Menurut Perpu No.1 tahun 2016 55
- B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak 60
- C. Pandangan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Medan terhadap Perpu No.1 tahun 2016 tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak 64

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 74
- B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama fitrah yang mengakui keberadaan naluri seksual .Islam, telah menentukan cara penyaluran nafsu syahwat secara baik melalui lembaga perkawinan. Oleh karenanya penyaluran nafsu syahwat di luar perkawinan tidak sesuai dengan cara yang ditentukan Islam dan oleh karena itu, perzinasaan dilarang tegas dan keras oleh Islam.¹ Selain itu, penerapan syariat Islam merupakan solusi terhadap berbagai problematika moral ini dan penyakit sosial lainnya. Karena seandainya syariat ini diterapkan secara kaffah (menyeluruh dalam segala aspek kehidupan manusia) dan sungguh-sungguh, maka sudah dapat dipastikan tingkat maksiat khalwat, zina, pemerkosaan dan kriminal lainnya akan berkurang drastis.

Berkaitan dengan hal tersebut, Tihami menyatakan bahwa: “Pernikahan adalah sunatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk- Nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ia

¹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 274.

adalah suatu cara yang dipilih Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya”.²

Adanya pernikahan menjadikan manusia menjadi makhluk yang beradab, dimana tuntutan biologis (*syahwat*) dapat tersalurkan dalam bingkai yang lebih baik antara seorang laki-laki dan perempuan. Walaupun Allah Swt telah memberi jalan perkawinan sebagai suatu cara yang sah sebagai jalan pemenuhan kebutuhan biologis, manusia masih tetap melakukan penyimpangan penyimpangan seksual sebagaimana kasus pelecehan seksual yang hari ini baru hangat diperbincangkan.

Tahun 2016 pemerintah menganggap kasus pelecehan seksual sudah dalam keadaan darurat . Kasus Pedofilia atau pelecehan kekerasan seksual terhadap anak menjadi pemberitaan yang hebat. Wacana pemberatan hukuman terhadap pelaku *pedofilia* semakin digencarkan. Kasus yang dialami Putri Nur Fauziah (9 tahun) yang tewas akibat kekerasan seksual di Kalideres Jakarta Barat dijadikan contoh kondisi darurat tersebut. Data Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan 22 juta anak

² Tihami, Sahrani, dan Sohari, *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2009), h. 6.

yang mengalami kekerasan dan semakin meningkat dan 42 % di antaranya merupakan kasus kejahatan seksual.³

Selanjutnya kasus “Robot Gedek” beberapa tahun silam, kasus yang sangat menggemparkan di mana pelaku mengaku telah menyodomi dan membunuh sejumlah anak laki-laki di Jakarta, dan kasus yang sama Baequni alias Babe (48 tahun) telah membunuh 7 bocah berusia di bawah 12 tahun, lebih dari seorang *pedofil*, Babe tampaknya juga seorang *necrofil* yakni seseorang yang senang berhubungan seks dengan mayat.⁴

Sebagai penjelasan, *pedofilia* adalah gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrument atau sasaran dari tindakan itu, umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. *Pedofilia* adalah aktivitas seksual yang melibatkan anak kecil, umumnya di bawah usia 13. Penderita *pedofilia* berusia lebih dari 16 tahun dan minimal lima tahun lebih tua dari si anak.

Dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh

³ *Koran Tempo*. 23 Oktober 2015. *Ide Hukuman Kebiri bagi Pedofilia*, h. 5

⁴ *Jawa Pos*, *Babeh Sang Pedofil Sadis*, h. 5

kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah memandang perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ide hukuman kebiri diusulkan oleh KPAI, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan Nasional kepada Presiden Jokowi. Selanjutnya Presiden Jokowi memberi sinyal setuju dengan segera membahas hal tersebut dengan sejumlah pejabat seperti Jaksa Agung M. Prasetyo. usulan tersebut telah ditindak lanjuti dengan penyusunan draf Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perpu). Pada akhirnya tanggal 26 Mei 2016, Pemerintah menerbitkan Perpu tentang Kebiri pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu Perpu No. 1 tahun 2016

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perpu tersebut akhirnya mengesahkan hukuman pidana Kebiri bagi pelaku Pelecehan seksual dengan pengibirian hormonal. Atas dasar pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo pada 26 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, bunyi Pasal II Perpu yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 25 Mei 2016 itu. Dengan adanya penerbitan Perpu Kebiri , Perpu No.1 tahun 2016 mendapat pertentangan terutama dari tokoh Ormas Islam dan kalangan Pesantren. Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Syamsul Anwar, tidak setuju dengan hukuman kebiri yang mengubah fisik manusia. Ketua Asosiasi Pondok Pesantren Jawa Timur , Gus Reza Ahmad Zahid,

menyatakan tak selayaknya pemerintah menerapkan hukuman kebiri, karena dalam fiqh Jinayah Islam tidak mengenal kebiri.⁵

Berdasarkan alasan di atas, terbitnya hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia mengundang reaksi kontra dari tokoh ormas Islam. Tetapi pemerintah tetap menerbitkan Perpu tentang hukuman Kebiri pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu tentang Perlindungan Anak. Atas dasar uraian di atas penulis tertarik dan bermaksud meneliti bagaimana, **“SANKSI HUKUM PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL (KEBIRI) TERHADAP ANAK MENURUT PERPU NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (TINJAUAN ANALISIS LPA KOTA MEDAN DAN HUKUM PIDANA ISLAM)”**.

B. Rumusan masalah :

Berdasarkan konteks latar belakang diatas, maka penulis menetapkan beberapa rumusan masalah yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak menurut Perpu No.1 tahun 2016?

⁵ *Koran Tempo*. 23 Oktober 2015. *Ide Hukuman Kebiri bagi Pedofilia*, h. 5

2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap Perpu No.1 tahun 2016 tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak?
3. Bagaimana pandangan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Medan terhadap Perpu No.1 tahun 2016 tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak menurut Perpu No.1 tahun 2016.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap Perpu No.1 tahun 2016 tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
3. Untuk mengetahui pandangan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Medan terhadap Perpu No.1 tahun 2016 tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini sangat berguna bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan dalam mempelajari dan mendalami ilmu hukum khususnya Hukum Jinayah Islam dan Hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.
- b. Dapat menjadi bahan rujukan penelitian hukum berikutnya dan menambah khasanah pengetahuan ilmu hukum Fiqh Jinayah Islam dan hukum positif khususnya yang berkaitan dengan hukuman kebiri bagi pelaku *pedofil*.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

- a. Bagi Pemerintah

Memberi masukan bagi penyelenggara Negara terutama bagi Lembaga Legislatif yang berhak merancang dan membuat peraturan perundang-undangan terutama dalam menentukan kaidah-kaidah hukum bagi pelaku *pedofil*.

- b. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman bagi masyarakat pada umumnya bagaimana penerapan hukuman kebiri ditetapkan.

E. Telaah Pustaka

Fungsi dilakukannya telaah pustaka terhadap skripsi adalah untuk membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan peneliti lain sebelumnya. Kemudian untuk memahami judul sebuah skripsi perlu pendefinisian judul secara professional, agar dapat diketahui secara jelas dan untuk menghindari kesalahfahaman dan untuk membedakan kajian ini dengan kajian sebelumnya, Maka penulis akan sebutkan beberapa skripsi tentang pelecehan seksual antara lain:

Pertama, skripsi yang dibuat oleh Abdul Faizin mahasiswa Jurusan Syariah STAIN Salatiga tahun 2010 dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polres Salatiga tahun 2004-2006)*. Pembahasan dalam skripsi ini penulis membahas tentang studi lapangan bagaimana kekerasan seksual terjadi di Salatiga dan membahas bentuk perlindungan hukumnya. Hasil penelitiannya adalah peran serta Polres Salatiga dalam perlindungan hukum terhadap korban

kekerasan seksual anak adalah bersifat menunggu dan walaupun demikian perlindungan hukum terhadap anak di Polres Salatiga telah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶

Kedua, skripsi yang dibuat oleh Lukman Hakim Harahap tahun 2014 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia di Yogyakarta*. Dalam skripsi ini penulis membahas bagaimana proses penyelidikan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak terjadi di wilayah Polresta Yogyakarta. Hasil dari penelitiannya bahwa proses penyidikan kasus *pedofilia* di Yogyakarta tunduk pada aturan KUHAP tetapi proses tersebut terhambat oleh beberapa faktor yaitu proses penyidikan yang panjang akibat gangguan psikis korban (anak), kedua untuk mendapatkan alat bukti, penyidik mendapatkan visum dan surat keterangan dari psikiater dari dana talangan dan belum

⁶ Abdul Faizin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polres Salatiga tahun 2004-2006)*. (Skripsi: Jurusan Syariah STAIN Salatiga, Tahun 2010).

mendapatkan dana yang strategis dari pemerintah untuk menangani kasus *pedofilia*.⁷

Ketiga, skripsi yang dibuat oleh Ngabdul Munnim mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia* membahas mengenai pengaturan hukum di Indonesia terhadap sanksi tindak pidana *pedofilia* dan apakah kebiri dapat digunakan sebagai alternatif hukuman bagi pelaku *pedofilia*?. Hasil penelitiannya adalah sanksi tindak pidana *pedofilia* yang diatur dalam KUHP dan UUPA, dianggap sudah tidak relevan atau tidak menimbulkan efek jera, sehingga belajar dari sanksi kebiri yang diterapkan oleh negara lain terhadap pelaku *pedofilia* maka penulis hukuman kebiri dapat digunakan sebagai alternatif sanksi pidana.⁸

Skripsi di atas pada umumnya membahas studi kasus kekerasan seksual terhadap anak, sedang dalam skripsi ini yang menjadi kajian utamanya adalah penulis bagaimana pendapat LPA

⁷ Lukman Hakim Harahap, *Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia di Yogyakarta*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

⁸ Ngabdul Munnim, *Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)

Kota Medan dan hukum Pidana Islam terkait pemberlakuan hukuman kebiri bagi pelaku *pedofilia* yang tertuang pada Perpu No. 1 Tahun 2016 konsep.

F. Batasan Istilah

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara terperinci, dengan maksud dapat diketahui secara jelas. Maka penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah terhadap penelitian ini. Istilah-istilah tersebut adalah ;

1. Kebiri: adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
2. Kejahatan Seksual Terhadap Anak: kejahatan seksual terhadap anak atau disebut dengan *pedofilia* adalah gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrument atau sasaran dari tindakan itu, umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. *Pedofilia* adalah aktivitas seksual

yang melibatkan anak kecil, umumnya di bawah usia 13. Penderita *pedofilia* berusia lebih dari 16 tahun dan minimal lima tahun lebih tua dari si anak. Individu dengan gangguan ini dapat tertarik pada anak laki-laki, perempuan atau keduanya, meskipun insiden aktivitas pedofilia hampir dua kali lebih mungkin diulang oleh orang-orang yang tertarik pada laki-laki. Individu dengan gangguan ini mengembangkan prosedur dan strategi untuk mendapatkan akses dan kepercayaan dari anak-anak.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting. penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Yaitu sebuah penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari buku-buku atau terbitan-terbitan resmi pemerintah.⁹

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian studi lapangan pada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Medan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif,

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 43

yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan secara normatif yaitu dengan mendekati masalah yang akan diteliti dengan mendasarkan pada Al-qur'an, Hadist, Kaidah Fiqih, Serta pendapat ulama' yang ada kaitannya dengan masalah hukuman Kebiri.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Kualitatif: pada penelitian ini penulis menyajikan data secara kualitatif dimana data disajikan dalam bentuk kata-kata berdasarkan cara pandang sifat, dan mutu objek penelitian. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis dari objek yang diamati.¹⁰ Sehingga data yang dikumpulkan bukan disajikan secara angka atau numerik.
- b. Sumber Data: pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan ini

¹⁰ Mahi Hikmat,. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 37

dilakukan langkah-langkah mengambil sumber data sebagai berikut:

- 1) Sumber Primer, yaitu wawancara dengan Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan dan bahan yang diambil dari aturan-aturan hukum yang mengikat sebagaimana hukum positif Indonesia yang diambil dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam yaitupada Al-qur'an, Hadist, Kaidah Fiqih, serta pendapat ulama' yang ada kaitannya dengan masalah hukuman Kebiri.
- 2) Sumber Sekunder, yaitu bahan yang diambil dari buku-buku literature yang berhubungan dengan tema judul yang diangkat penulis, yaitu buku-buku literature , artikel, Koran dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan kekerasan seksual, pedofilia dan kebiri.

c. Tehnik dan Pengumpulan Data

Pada tehnik penumpulan data yang telah diperoleh, penulis menggunakan teknik membaca, mencatat, mengutip dan mengumpulkan literature-literatur data yang berupa buku-buku, artikel, sumber hukum positif dan sumber hukum Islam kemudian peneliti mempelajari dan mengedit guna dijadikan bahan penelitian deskriptif.

d. Analisis Data

Pada proses analisa data penulis kemudian melakukan tehnik deskriptif analitik guna memberikan suatu gambaran, melukiskan dan memaparkan hasil penelitian yaitu memaparkan pandangan hukum kebiri ditinjau dari sudut pandang fiqh jinayah Islam

H. Sistematika Pembahasan

Bab I: Pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian.

Bab II: Tinjauan umum tentang pedofilia dan kebiri, yaitu memberi gambaran meliputi: Pengertian *pedofilia*, sejarah mengenai *pedofilia*, faktor penyebab *pedofilia*, akibat *pedofilia* terhadap korban, *pedofilia* sebagai perilaku kekerasan seksual

anak, akibat dari *pedofilia* ,pengertian kebiri ,sejarah kebiri , efek dari kebiri ,teori pidana dan pemidanaan ,bentuk-bentuk kebiri dan Teori Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah).

Bab III: Berisi tentang gambaran tentang Perpu No. 1 tahun 2016 ,latar belakang dan dasar hukum diterbitkannya Perpu No.1 tahun 2016.

Bab IV:Berisi tentang pembahasan yaitu tinjauan hukum Islam mengenai hukuman kebiri bagi pelaku *pedofilia* dan konsep hukuman *pedofil* menurut hukum Islam.

Bab V: Penutup yang merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
KEBIRI SEBAGI BENTUK HUKUMAN

A. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum pidana Islam.

Hukum pidana Islam, martabat dan hak hidup manusia semua hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal, Hal ini dapat terbaca misalnya pada Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nomor: 003/Munas/11/ 1997 tentang *Al-Huquq Al-Insaniyah Fil-Islam* (Hak Asasi Manusia dalam Islam), bahwa “Islam merupakan ajaran yang menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan Al-Qur'an menjamin adanya hak pemuliaan dan pengutamaan manusia.¹

Dengan demikian manusia memiliki hak al-karamah dan hak *al-fadilah*. Apalagi misi Rasulullah adalah *rahmatan lil-Alamin*, di mana kemaslahatan/ kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia dan alam semesta. Elaborasi (pengejawantahan)

¹ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011), h. 104

misi atau tujuan hukum Islam di atas disebut sebagai *al-khams*) (lima prinsip dasar) yang meliputi:

Hifdzud-din: Memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya (*al-din*). Sementara itu Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama yang bersifat lintas etnis, oleh karena itu, Islam menjamin kebebasan beragama, dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan yang lainnya.

Hifdzunf-nafs: Memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.

Hifdzul-aql: Adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain-lain.

Hifdzun-nasl: Merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. *Free sex*, zina, menurut syara', homoseksual adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan *hifdzu-nasl*.

Hifdzul-mal: Dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, monopsoni dan lain-lain. Hal inilah yang dimaksudkan sebagai perlindungan sumberdaya ekonomi bangsa (rakyat) dari gangguan tangan-tangan koruptor, penyelundup dan penyalahgunaan jabatan yang mengakibatkan kehancuran perekonomian di negeri ini misalnya.²

Lima prinsip dasar di atas sangatlah relevan dan bahkan seiring dengan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia (HAM). Di samping itu, Islam sebagai agama tauhid, datang untuk menegaskan kalimat *La Illaha Illallah*, tiada Tuhan selain Allah. Suatu keyakinan atau aqidah yang secara transendental, dengan menisbikan tuntutan ketaatan kepada segenap kekuasaan

² *Ibid...*, h. 105

duniawiserta segala perbudakan manusia dengan berbagai macam jenis kelamin, status sosial, warna kulit dan lain sebagainya. Keyakinan semacam ini jelas memberikan kesuburan bagi tumbuhnya penegakan HAM melalui suatu kekuasaan yang demokratis.

Di antara lima prinsip dasar yang sekaligus menjadi pijakan tujuan pidana Islam itu adalah menunjukkan mengenai salah satu keunggulan tujuan pidana Islam dibandingkan dengan tujuan hukum pidana Indonesia. Misalnya, dalam soal perlindungan jiwa dan keturunan, hukum Islam telah memberikan jaminan yang jelas dan konkrit.³

Pada hukum pidana Islam dikenal dua bentuk hukuman, yaitu had dan ta'zir. Yang termasuk dalam hukum had, yaitu murtad, zina, qadaf, mencuri, merampok, dan meminum khamar. Status hukum bagi pelanggaran-pelanggaran tersebut terdapat dalam nash, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Itulah sebabnya, hukuman had merupakan bentuk hukum yang ditetapkan oleh syariat. Sementara hukuman ta'zir, yaitu bentuk hukuman yang tidak terdapat dalam nash Al-Quran ataupun Sunnah Nabi, tetapi

³ *Ibid*

didasarkan pada pertimbangan akal sehat dan keyakinan hakim untuk mewujudkan maslahat dan menimbulkan rasa keadilan. Para ulama sepakat bahwa hukuman ta'zir dapat diterapkan pada setiap maksiat pelanggaran yang tidak ada hukuman *had*-nya.⁴ Dalam rumusan tersebut, bahwa yang dilarang adalah perbuatan yang menimbulkan perbuatan yang dilarang dan dalam masalah pedofilia sendiri adalah perilaku pelaku yang mensodomi anak di bawah umur dan masuk dalam zina.

2. Pengertian Perzinaan

Orang yang berzina terbagi menjadi dua, yaitu *muhshan* (sudah menikah) dan *ghair muhshan* (belum menikah). Hukuman bagi pezina *muhshan* adalah rajam. Rasulullah sendiri, ketika dihadapkan kepadanya pria dan wanita *muhshan* yang berzina, beliau menghukumnya dengan merajam. Penegasan ini masih disepakati para sahabat, tabi' in, para ulama dan para fuqaha islam. Tidak satupun dari mereka yang meragukan hukum rajam sebagai hukum syari'at yang tetap sesuai dengan dalil-dalil sunnah yang kuat lagi shahih. Ibnu Taimiyah juga menegaskan, bahwa pelaku zina *mukhshon* dirajam hingga mati, sebagaimana yang

⁴ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*..., H. 54

dilakukan Nabi SAW terhadap Maiz bin Malik Al Aslami. Beliau juga pernah merajam wanita Ghamid, dan lain sebagainya.⁵

Adapun macam-macam perbuatan perzinaan yaitu :

a. *Muhshan* (yang sudah menikah)

Hukuman (*had*) bagi pezina yang *muhshan* (yang sudah menikah) adalah rajam (dilempari batu).

b. *Ghair muhshan* (yang belum menikah)

Hukuman (*had*) untuk pezina *ghair muhshan* (yang belum menikah) adalah 100 kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun di tempat yang jaraknya sama dengan jarak seseorang boleh meng-*qashar* shalat.⁶

c. Sodomi (*liwath*)

Hukum orang yang melakukan *Iiwath* (homo seksual atau lesbi) dan melakukan hubungan badan dengan hewan, sama dengan hukuman zina karena tergolong perbuatan keji. Pelakunya dirajam bila *muhshan* dan didera apabila *ghairu muhshan*. Adapun objek perbuatan *Iiwath* diberlakukan atasnya hukuman zina *ghairu muhshan* secara mutlak

⁵ Ibnu Taimiyah, 1997: 100, Hadist ini dikutip dari Abdul Wahid, Muhammad Irfan., *Perlindungan...*, h. 127

⁶ Mushtafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Noura Books, 2012), h. 554

meskipun sudah menikah, karena yang dianggap melakukan perbuatan yang sama dengan zina adalah subjek (pelaku) yang memasukkan kemaluannya ke dalam dubur objek, sementara objek tidak bisa disamakan dengan subjek. Oleh karena itu, ia tidak dikenakan zina muhsan (rajam).⁷

d. Homoseksual

Homoseksual adalah hubungan seksual antara orang-orang yang sama kelaminya, baik sesama pria maupun sesama wanita. Namun biasanya istilah homosex itu dipakai untuk seks antar-pria; sedangkan lesbian (female homosex) dipakai untuk seks antar-wanita.⁸

Ulama fiqh telah sepakat atas keharaman homoseks dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat. Hanya, di antara ulama tersebut ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan untuk menghukum pelakunya, yaitu:

1. Pelakunya harus dibunuh secara mutlak.

⁷ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, h. 258

⁸ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta : Teras, 2009), h. 93

2. Pelakunya harus di-hadsebagaimana hadzina. Jadi, jika pelakunya masih jejak, ia harus didera. Jika pelakunya muhshan, ia harus dirajam.
3. Pelakunya harus diberi sanksi.⁹

Segala bentuk tindakan atau hubungan yang berkaitan dengan seksual dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan zina, sehingga hukuman rajam dianggap layak di jatuhkan bagi pelaku pedofilia. Keberlakuan hukum rajam dalam hukum pidana islam bukan hanya menyangkut urusan pribadi yang menyinggung urusan pribadi semata, namun juga mempunyai dampak negatif untukk masyarakat. Hukum rajam sendiri terdapat hak Allah di dalamnya dan jenis hukumannya sudah di tetapkan oleh nas dan tidak bisa di hapuskan demi golongan perorangan maupun kelompok semata.

B. Hukuman Kebiri dalam Prespektif Fiqih Jinayah

Chemicalstration atau kebiri kimia adalah hukuman yang diberikan oleh tindak pidana di beberapa benua Eropa dan Amerika. Hukuman ini diertlakukan atas tindakan pencegahan dan memeberikan sanksi tegas bagi pelaku penyimpangan seksual. Pada

⁹ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum...*, h. 318

masyarakat yang masih sederhana, norma kesusilaan bisa dianggap sesuai untuk mengatur ketertiban kehidupan kemasyarakatan. Karena norma kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang agar menjadi manusia taat kepada ketentuan dan menjadi makhluk yang mempunyai nilai kesempurnaan.

Dalam hukum pidana islam penetapan hukum oleh hakim atau waliyuramriatas kadar minimum dan maksimum dapat dikategorikan hukuman takzir. Karena dalam jarimah had, hukuman sudah ditetapkan oleh nas dan terdapat hak Allah didalamnya, jadi tidak akan adapengurangan dan penambahan sanksi. Tujuan dijatuhkannya hukuman adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat.¹⁰ Tujuan tersebut supaya hukuman dapat memenuhi tugas yang semestinya. Dasar-dasar yang mewujudkan tujuan hukuman adalah sebagai berikut :¹¹

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia...*, h. 19

¹¹ *Ibid...*, h. 20.

1. Hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi.
2. Batasan hukuman adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
3. Apabila untuk memelihara masyarakat dari kejahatan si pelaku, si pelaku dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya dicegah dari masyarakat, hukuman yang harus dijatuhkan adalah hukuman mati atau memenjarakan sampai si pelaku mati selama ia belum bertaubat dan keadaanya belum menjadi baik.
4. Semua hukuman yang menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat adalah hukuman yang di syariatkan.
5. Mendidik si pelaku kejahatan bukan berarti bentu balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya.

Maka dari itu, hukuman kebiri kimia *chemicalstration* di kategorikan dalam hukuman takzir yang jenis hukumannya belum ada dalam nas dan bisa ditentukan kadar minimum dan maksimum oleh hakim. Takzir menurut bahasa adalah mashdar (kata dasar)

bagi ‘azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, membantu. takzir juga berarti hukuman yang berarti memberikan pelajaran. Disebut dengan takzir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. takzir sering juga disamakan oleh para fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman *hudud* dan *kaffarat*.¹²

Ulama fiqh telah sepakat atas keharaman homoseks dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat. Hanya, di antara ulama tersebut ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan untuk menghukum pelakunya, yaitu:

1. Pelakunya harus dibunuh secara mutlak.
2. Pelakunya harus di-hadsebagaimana had zina. Jadi, jika pelakunya masih jejak, ia harus didera. Jika pelakunya muhsan, ia harus dirajam.
3. Pelakunya harus diberi sanksi.¹³

¹² A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), h. 161

¹³ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum .*, h. 18

Dalam hukum pidana islam penetapan hukum oleh hakim atau waliyuramriatas kadar minimum dan maksimum dapat dikategorikan hukuman takzir. Karena dalam jarimah hudud , hukuman sudah ditetapkan oleh nas dan terdapat hak Allah didalamnya, jadi tidak akan ada pengurangan dan penambahan sanksi. Maka dari itu, hukuman kebiri kimia chemicalstrationdikategorikan dalam hukuman takzir yang jenis hukumannya belum ada dalam nas dan bisa ditentukan kadar minimum dan maksimum oleh hakim.

Para ulama membagi jarimah takzir menjadi dua bagian yaitu

:¹⁴

1. Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah Maksud dari jarimah yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalanya membuat kerusakan dimuka bumi, perampukan, pencurian, perzinaan, pemberontakan, dan lain sebagainya.
2. Jarimah takzir yang berkaitan dengan hak perorangan
Sementara itu jarimah takzir berkaitan dengan hak

¹⁴ A Djazuli, *Fiqih Jinayah...*, h. 163

perorangan adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia. Misalnya tidak membayar hutang dan penghinaan.

Akan tetapi, ada ulama yang membagi kedua jarimah ini menjadi dua bagian lagi, yakni jarimah yang berkaitan dengan campuran antara hak Allah dan hak adami dimana yang dominan adalah hak Allah, seperti menuduh zina dan campuran antara hak Allah dan hak adami dimana yang dominan adalah hak hamba seperti, jarimah perlukaan. Hukuman (had) untuk pezina ghair muhsan (yang belum menikah) adalah 100 kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun di tempat yang jaraknya sama dengan jarak seseorang boleh meng-qashar shalat.

Hukum untuk pelaku sodomi (*liwath*) dan orang yang menyetubuhi binatang sama dengan hukum orang yang berzina. *Liwath* adalah persetubuhan sesama jenis yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth a.s. (kaum sodom). *Liwath* atau sodomi adalah seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dubur laki-laki lain. Begitu juga apabila seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dubur perempuan yang tidak halal dinikmati

tubuhnya (seperti budak nya yang sudah menikah).¹⁵ Secara substansi materiilnya, perkosaan juga mengandung unsur perzinaan, yakni suatu jenis persetubuhan di luar perkawinan yang sah, dengan catatan perbuatan itu tidak didasari suka sama suka, melainkan atas dasar paksaan. Faktor paksaan dan kekerasan yang mendukung keberhasilan perbuatan itulah yang harus dijadikan acuan bahwa perbuatan itu melebihi kasus perzinaan.¹⁶

Dengan melihat pemaparan diatas, hukum kebiri kimia atau *chemical castration* terhadap tindak pidana pelaku pedofilia atau penyimpangan seksual terhadap anak-anak mencakup unsur dalam suatu hukuman yaitu : sebagai upaya pemabalasan (*revenge*), atas perbuatan melanggar hukum dan ketentuan yang sudah dibuat atau ditetapkan. Menghapus dosa (*explanation*), memberikan efek jera (*deterent*) bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak melakukan pelanggaran kejahatan yang sama.

Segala bentuk tindakan atau hubungan yang berkaitan dengan seksual dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan zina, sehingga hukuman rajam dianggap layak di jatuhkan bagi pelaku pedofilia. Keberlakuan hukum rajam dalam hukum pidana

¹⁵ Mushtafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i...*, h. 554

¹⁶ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan...*, h. 128

islam bukan hanya menyangkut urusan pribadi yang menyinggung urusan pribadi semata, namun juga mempunyai dampak negatif untuk masyarakat. Hukum rajam sendiri terdapat hak Allah di dalamnya dan jenis hukumannya sudah ditetapkan oleh nas dan tidak bisa di hapuskan demi golongan perorangan maupun kelompok semata. Selain itu, hukuman kebiri dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM) seperti tercantum dalam pasal 28 J ayat (2) yaitu :¹⁷ *“dalam menjalankan hak dan kebebasanya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata –mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai –nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi”*.

Hal ini juga di perkuat dengan keputusan MK menyatakan bahwa hak asasi dapat di batasi dengan pasal 28 J, sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur hak asasi manusia. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan

¹⁷ Lihat Undang –Undang Dasar 1945 Pasal 28 J Ayat (2)

jenis hukuman yang sepadan. Mengingat segala sesuatu yang berhubungan dengan seksual merupakan perbuatan zina dan harus dihukum rajam sesuai dengan ketentuan nas.

BAB III
TEORI HUKUM TERHADAP
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, martabat dan hak hidup manusia semu hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal, Hal ini dapat terbaca misalnya pada Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nomor: 003/Munas/11/ 1997 tentang *Al-Huquq Al-Insaniyah Fil-Islam* (Hak Asasi Manusia dalam Islam), bahwa “Islam merupakan ajaran yang menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan Al-Qur'an menjamin adanya hak pemuliaan dan pengutamaan manusia.¹

Dalam hukum pidana Islam dikenal dua bentuk hukuman, yaitu *haddan ta'zir*. Yang termasuk dalam hukum had, yaitu murtad, zina, qadaf, mencuri, merampok, dan meminum khamar. Status hukum bagi pelanggaran-pelanggaran tersebut terdapat dalam nash, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Itulah sebabnya, hukuman had merupakan bentuk hukum yang ditetapkan

¹ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan ...*, h. 104.

oleh syariat.² Dalam rumusan tersebut, bahwa yang dilarang adalah perbuatan yang menimbulkan perbuatan yang dilarang dan dalam masalah pedofilia sendiri adalah perilaku pelaku yang mensodomi anak di bawah umur. Hukuman (had) untuk pezina *ghair muhshan* (yang belum menikah) adalah 100 kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun di tempat yang jaraknya sama dengan jarak seseorang boleh meng-qashar shalat.

Hukum untuk pelaku sodomi (*liwath*) sama dengan hukum orang yang berzina. *Liwath* adalah persetubuhan sesama jenis yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth a.s. (kaum sodom). *Liwath* atau sodomi adalah seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dubur laki-laki lain. Begitu juga apabila seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dubur perempuan yang tidak halal dinikmati tubuhnya (seperti budaknya yang sudah menikah).³ Kasus tindakan pedofilia ini hampir selalu disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan serta ancaman oleh si pelaku kepada korbannya, sehingga dalam pembuktian akan sulit mengharapkan pengakuan dari pelaku. unsur dalam jarimah zina itu ada dua yaitu: persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan

² Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...*,h. 54.

³ Mushtafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih...*,h. 554.

atau niat melawan hukum.⁴ Hanya saja di antara ulama berbeda pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang harus ditetapkan bagi pelakunya. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Syi'ah Zaidiah serta Imamiyah, berpendapat bahwa hukuman bagi penyimpangan seks tersebut diartikan sebagai perbuatan zina.

Pendapat yang samajuga dikemukakan Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah. Alasan tersebut disamakan dalam istilah fahisyah, baik itu wathi di dubur (homoseksual) maupun wathi di dubur (zina). Mengenai hukumannya, ketiga imam ini berpendapat: Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyyah dalam satu riwayat, perbuatan tersebut dikenakan hukum rajam dengan dilempari batu sampai mati.⁵ Ulama fiqh telah sepakat atas keharaman homoseks dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat. Hanya, di antara ulama tersebut ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan untuk menghukum pelakunya, yaitu:

- a. Pelakunya harus dibunuh secara mutlak.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik , 2005), h. 8.

⁵ *Ibid...*, h. 12-13

- b. Pelakunya harus di-had sebagaimana had zina. Jadi, jika pelakunya masih jejak, ia harus didera. Jika pelakunya muhsan, ia harus dirajam.
- c. Pelakunya harus diberi sanksi.⁶

Dalam hukum pidana Islam penetapan hukuman oleh hakim atau *waliyyul amri* atas kadar minum dan maksimum dapat dikategorikan sebagai hukuman ta'zir, karena dalam jarimah had, hukuman sudah ditetapkan dalam nash dan terdapat hak Allah di dalamnya, jadi tidak ada pengurangan atau penambahan dalam menetapkan sanksi. Maka dari itu, hukuman kebiri kimia atau chemical castration dikategorikan ke dalam hukuman ta'zir yang jenis hukumannya belum ada dalam nash dan bisa ditentukan kadar minimum dan maksimumnya oleh hakim.⁷

Kekerasan seksual terhadap anak atau juga disebut dengan pedofilia. Kata pedofilia berasal dari bahasa Yunani: *paidophilia*, *pai* (anak-anak) dan *philia* (cinta, persahabatan).⁸ Jadi pedofilia adalah cinta anak-anak. Dalam hal ini rasa kecintaan pada anak-anak diartikan dengan rasa kecintaan orang dewasa atas hasrat

⁶ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...*, h. 318.

⁷ Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana...*, Hal. 248

⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/pedofili> diakses pada tanggal 25 Oktober 2020

seksual terhadap anak-anak dibawah umur. Pedofilia adalah salah satu bentuk penyakit jiwa kelainan ketertarikan seksual. Untuk melampiaskan nafsu birahinya seorang pedofil akan mencari anak-anak pra-pubertas-anak yang belum matang dan siap baik reproduksi seksualnya, tujuannya adalah agar pedofil bisa menguasai dan memaksakan penisnya dipentrasikan ke dalam dubur, liang vagina atau oral seks sehingga korban akan merasakan sakit yang amat sangat. Rasa sakit yang amat sangat inilah yang diharapkan oleh pelaku dialami oleh korban. Dengan erangan rasa sakit si pedofil akan semakin terangsang dan akan semakin gila membenetrasikan penisnya ke dalam dubur.⁹

Penderita pedofilia tidak hanya dialami oleh orang yang belum mempunyai pasangan, tidak jarang juga para pelaku tersebut sudah berkeluarga. Penderita pedofilia terkadang bukan hanya laki-laki tetapi juga menjangkit perempuan dan mereka tidak hanya tertarik pada lawan jenis, korbannya pun bisa jadianak laki-laki maupun perempuan. Namun pada umumnya pelaku pedofil tersebut adalah laki-laki.

⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan...*, h. 44.

B. Macam-Macam Kekerasan Seksual terhadap Anak

Secara umum kekerasan seksual terhadap anak disebut dengan pedofilia yang digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual terhadap individu yang memiliki hasrat erotis abnormal terhadap anak-anak.¹⁰ Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan objek seksual maupun untuk komersial, memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak. Perilaku seksual yang menyimpang dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori penyimpangan sebagai berikut:¹¹

- 1) Untuk tujuan objek seksual:
 - a) Pedofilia, terdiri dari pedofilia homoseksual dan pedofilia heteroseksual.
 - b) Incest
 - c) Hiperseksualitas.
 - d) Keterbatasan kesempatan (*isolated geografis*) dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomis.
- 2) Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga:

¹⁰ Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung:PT. Refika Aditama,2005), h. 71

¹¹ *Ibid...*,h. 69.

- a) Orang tua yang dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi. Keadaan ini sering terjadi pada lingkungan keluarga yang taraf sosial ekonominya sangat rendah dan norma (standar) moralnya-pun rendah.
- b) Germo (pengelola praktek prostitusi), yang akan terus berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya. Biasanya, mereka akan mencari gadis yang masih polos dan lugu.
- c) Untuk tujuan avonturir seksual Disamping kategori tersebut diatas ada pula sementara anak perempuan dan laki-laki yang mencari kehangatan emosional diluar rumah melalui perilaku seksual eksekif dan bersifat avonturir, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa. Biasanya, mereka ini berasal dari keluarga yang tidak memberikan kasih sayang, kehangatan emosional dan perhatian yang cukup. Bahkan, sering menolak kehadiran mereka (*rejected*).

Objek seksual pada pedofilia adalah anak-anak dibawah umur. Pedopilia terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Pedofilia homoseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak laki-laki dibawah umur;
2. Pedofilia heteroseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak perempuan dibawah umur. Bentuk-bentuk Kekerasan

Pedofilia dan ancaman pidananya :¹²

Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak/ Pedofilia	Pasal	Ancaman Pidana
Perbuatan cabul sesama jenis kelamin	292 KUHP	Selama-lamanya 5 Tahun penjara
1. Merusak kesopanan dimuka umum 2. Merusak kesopanan dimuka orang lain yang tidak sengaja hadir (Tertangkap basah)	281 KUHP	Selama-lamanya 2 Tahun 8 Bulan penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-
Perbuatan cabul terhadap anak berusia dibawah 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin.	290 KUHP	Selama-lamanya 7 Tahun penjara
Jika perbuatan yang diatur dalam pasal 290 Kuhp	Pasal 291 ayat (1) KUHP	Selama-lamanya 12 Tahun penjara

¹² Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan...*,h.51.

menyebabkan luka berat pada tubuh		
Jika perbuatan yang diatur dalam pasal 290 KUHP menyebabkan orang mati	Pasal 291 ayat (2) KUHP	Selama-lamanya 15 Tahun penjara

Penyebab dari munculnya penyakit ketertarikan seksual ini bisa disebabkan pertama oleh pengalaman masa kecilnya yang tidak mendukung perkembangan kedewasaannya dan kedua bisa juga karena trauma pernah mendapatkan kekerasan seksual dari orang dewasa.¹³ Yang menjadi korban dari perilaku pedofilia adalah anak-anak. Dikarenakan, bagi mereka anak-anak merupakan obyek yang tepat, polos dan mudah dibohongi dengan sedikit bujukan-bujukan berupa hadiah-hadiah yang mereka sukai, anak-anak akan mau melakukan apapun yang mereka inginkan.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pedofilia

Hukum itu disusun, dibuat dan disahkan tentu saja ada tujuannya bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini, baik hukum itu berasal dari Allah SWT maupun produk manusia sendiri. Dengan tujuan ini, maka akan ada suatu atau beberapa pencapaian

¹³ *Ibid...*, h. 44.

(idealitas) yang didambakan manusia selaku subjek dan objek pemberlakuan hukum.¹⁴ Tujuan tersebut dapat dikaitkan dengan kasus kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) baik dari aspek pelaku, masyarakat maupun korban.

1) Pelaku

Berkaitan dengan pelaku, hukuman yang dijatuhkan merupakan balasan yang setimpal atau diharapkan pelaku dapat menebus dosadosa (atas kekejian) yang dilakukan kepada korban. Pelaku dikenakan hukuman yang cukup berat yang dapat membuatnya menjadi jera atau agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya. Ada tuntunan untuk mengantarkan manusia pada pintu taubat, yakni dimensi spiritualitas yang dilalui manusia dalam membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa, tercela, menodai agama dan merugikan orang lain. Manusia (pelaku) diberikan sanksi yang tidak sebatas meringankan bebannya di dunia, namun juga diorientasikan untuk meringankan beban yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

¹⁴ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan...*, h. 85

2) Masyarakat

Hukuman yang cukup berat dijatuhkan kepada pelaku itu diharapkan menjadi suatu proses pendidikan kesadaran perilaku dari kecenderungan berbuat jahat. Hukuman itu menjadi prevensi (pencegahan) agar anggota masyarakat yang hendak berbuat jahat tidak meneruskan aksi kejahatannya. Jika pelaku kejahatan kekerasan seksual mendapatkan sanksi hukum sebagaimana yang digariskan dalam syari'at Islam, maka sangat mungkin anggota masyarakat yang bermaksud melakukan perbuatan sejenis dapat dicegahnya sejak dini.

3) Korban

Dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan. Perlindungan hukum kepada wanita yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas kepada dihukumnya pelaku, namun juga kepada akibat-akibat yang menimpanya, seperti kehamilan akibat perkosaan (dibahas dalam sub bab berikutnya). Korban

tindak kekerasan seksual memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan. Rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya pasca tindak kekerasan itu mendapatkan perhatian yang serius dari hukum Islam. Korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya, namun wajib dijumpaikan oleh penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya.¹⁵

Sesuai dengan kriteria pidofilia, dalam kasus ini jelas ada persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan yang sah antara keduanya. Sesuai dengan konsep zina dalam hukum pidana Islam dikenakan terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun yang belum menikah, Islam menganggap zina tidak hanya sebagai perbuatan yang memalukan lainnya, tetapi akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, mengakibatkan terjadinya berbagai penyakit baik jasmani maupun rohani.¹⁶ Terlebih lagi apabila tindak pidana zina ini adalah kasus pemerkosaan, yang jelas hal itu akan sangat berbeda dengan zina

¹⁵ *Ibid...*, h. 95-96

¹⁶ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rienika Cipta, 2007), h. 31.

biasa. Walaupun antara keduanya sama-sama menyangkut masalah pemenuhan hasrat seksual.

Sementara dalam zina bisa saja dilakukan atas dasar suka sama suka, akan tetapi dalam hukum pidana Islam syarat untuk dapat dijatuhkannya had bagi pelaku zina adalah terdapatnya 4 (empat) orang saksi laki-laki yang kesemuanya harus melihat dengan jelas peristiwa itu pada saat terjadi dan ditempat terjadinya peristiwa. Apabila hal itu tidak dapat dilakukan, maka justru kemudian bisa terjadi korban pemerkosaan itu malah dihukum atas dasar menuduh orang lain berbuat zina. Dalam kasus pedofilia ini, terjadi pelecehan seksual yang pelakunya adalah orang dewasa dan korbannya merupakan anak-anak yang masih di bawah umur. Sehingga dari banyak kasus pedofilia yang ada, dapat diketahui seperti pada pembahasan bahwa tindak pedofilia ini terjadi apabila:

- 1) Ada persetubuhan yang sebenarnya.
- 2) Persetubuhan itu di luar pernikahan yang sah antara keduanya.
- 3) Pelaku adalah orang dewasa.

4) Antara keduanya, pelaku dan korban masih ada hubungan kerabat. Studi yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur bekerja sama dengan UNICEF (2000), berhasil mengungkap bahwa seringkali pelaku tindak perkosaan adalah orang yang sudah dikenal korban, baik itu tetangga, saudara, kerabat, guru, atau bahkan kakek atau ayah kandung korban.¹⁷

Pada hukum pidana Islam, segala macam persetubuhan yang dilakukan di luar pernikahan yang sah antara keduanya merupakan suatu kejahatan yaitu termasuk dalam tindak pidana zina. Karena sebagian besar kasus ini pemerkosaan antara laki-laki dewasa dengan anak-anak perempuan yang masih di bawah umur. Maka dengan itu bila hal ini dikaitkan dengan hukum zina dalam hukum pidana Islam, karena dalam kasus pedofilia ini persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan yang sah antara keduanya merupakan suatu kejahatan yaitu termasuk dalam tindak pidana zina. Karena sebagian besar kasus ini pemerkosaan antara laki-laki dewasa dengan anak-anak perempuan yang masih dibawah umur. Maka dengan itu bila hal ini dikaitkan dengan hukum zina dalam hukum

¹⁷ Abu Hurairah, *Kekerasan...*, h. 71.

pidana Islam, karena dalam kasus pedofilia ini persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan yang sah antar keduanya. Sehingga dapat dikaitkan adanya tindak pidana zina. Sehingga apabila kasus pedofilia ini dikaitkan dengan tindak pidana zina dalam hukum pidana Islam maka dapat dikaitkan bahwa dalam kasus pedofilia ini terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Wathi haram.
- 2) Sengaja.
- 3) Adanya itikad jahat.
- 4) Pelaku dalam keadaan muhsan atau sudah menikah.

D. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Ketertarikan orang dewasa terhadap seks rekreasional yang menempatkan anak sebagai objek perangsang dan pelampiasan libido di dalam KUHP dikategorikan sebagai tindakan yang terlarang dandiancam dengan hukuman pidana. Secara normatif hal ini diatur dalam pasal 287 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: "Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya. sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata

berapa umurnya. bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Dari bunyi pasal 287 KUHP tersebut dapatlah dipahami bahwa hukum pidana berusaha memberikan perlindungan normatif terhadap anak dari kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan (persetubuhan) yang datangnya berasal dari orang dewasa. Dengan menentukan bahwa orang dewasa diancam dengan hukuman pidana penjara selama 9 tahun apabila memperkosa anak yang belum cukup umur (di bawah 15) atau diperkirakan masih belum cukup umur itu artinya KUHP menilai persetubuhan antara orang dewasa dengan anak akan berdampak merusak secara fisik dan psikologis anak. Karena dampaknya yang merusak inilah KUHP kemudian memberikan penilaian bahwa tindakan ini adalah tindakan yang jahat dan harus dihukum.

Pencarian kenikmatan seksual orang dewasa yang berakibat merusak fisik dan psikologis anak dalam hukum pidana indonesia (KUHP) adalah tindakan yang tercela. Artinya, ada "kekuatan" normatif yang diciptakan oleh KUHP untuk menghambat libido disalurkan pada objek yang tidak semestinya. Meminjam pemikiran dari Sigmund Freud. tindakan menghambat ini dilakukan agar

libido bisa disalurkan secara positif atau ke dalam bentuk tindakan yang tidak merusak.¹⁸

Barang siapa melakukan zina dengan seorang wanita, tetapi di tempat di bawah kemaluan (bukan pada kemaluan), seperti menempelkan kemaluannya pada salah satu bagian tubuh wanita, ataupun mencumbu atau mencium wanita yang tidak halal baginya dan lain-lain, dikenakan hukuman ta'zir. Maksud ta'zir adalah setiap hukuman yang membuat jera menurut kebijakan seorang hakim muslim yang tepercaya, baik berupa pukulan, pengasingan, penjara, penghinaan, dan lain-lain karena perbuatannya tidak tergolong perilaku yang dikenakan hukuman had ataupun kaffarah. Hukuman ta'zir tidak boleh sama atau melebihi hukuman had terendah, yaitu empat puluh kali dera, seperti hukuman had orang yang meminum minuman keras sehingga ta'zir harus lebih rendah dari hukuman itu. Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari An-Nu'man bin. Basyir bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa menghukum seseorang hingga mencapai had, dalam suatu perbuatan yang tidak mewajibkan had, dia tergolong orang-orang

¹⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan...*, h. 16-17

yang melampaui batas."¹⁹ Hukuman ini berlaku untuk mereka yang belum menikah adalah hukuman dera dan pengasingan selama satu tahun. Bagi mereka yang sudah menikah adalah hukuman rajam.

Karena sebagian besar kasus pedofilia ini adalah pemerkosaan antara orang dewasa laki-laki baik itu sudah menikah atau belum menikah dengan anak perempuan yang masih di bawah umur, maka dengan itu bila hal ini dikaitkan dengan hukum zina dalam hukum pidana Islam, karena dalam kasus pidana pedofilia ini ada persetubuhan yang dilakukan di luar pernikahan yang sah antara keduanya. Sehingga dapat dikaitkan adanya tindak pidana zina. Tetapi dalam perzinaan ini bukan merupakan zina biasa yang dapat saja dilakukan atas dasar suka sama suka, tetapi lebih jauh dari itu adanya unsur-unsur pemaksaan dan ancaman yang ditunjukkan pelaku pada korbannya.

Kasus tindak pidana pedofilia ini hampir selalu disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan dan ancaman pelaku terhadap korbannya, sehingga dalam pembuktian akan sulit untuk dapat mengharap pengakuan dari pelaku itu sendiri. Bisa saja yang terjadi adalah sebaliknya korban selalu berada dalam keadaan tertekan.

¹⁹ Mustofa Hasan, Beni AhmadSaebani, *Hukum Pidana Islam...*, h.54.

Had zina juga bisa dijatuhkan, hukuman ini bisa dijatuhkan kepada pelaku tergantung adanya empat orang saksi laki-laki yang muslim. Hal ini mungkin akan sulit untuk dapat diterapkan pada kasus pedofilia ini karena tindak pidana ini biasanya dilakukan secara tersembunyi, apalagi yang terjadi adalah pemerkosaan yang pada umumnya dilakukan secara tertutup dan tersembunyi, sehingga menghindari kesaksian orang lain. Pembuktian yang ketiga adalah dengan qarinah, yaitu dengan melihat adanya indikasi-indikasi yang menunjukkan suatu bukti bahwa pada diri seorang telah melakukan perzinaan.

Pada pembuktian yang terakhir ini dapat saja dilakukan dengan adanya kehamilan, vishum dari ahli, dan sebagainya. Melihat kasus-kasus ini tindak pidana adalah pemerkosaan, sehingga bukti-bukti dari pemeriksaan medis juga diperlukan. Apabila memang dalam pembuktian itu dapat terbukti maka pada pelaku dijatuhkan hukuman rajam, karena pelaku dalam keadaan muhsan. Seandainya pelaku tindak pidana seorang yang masih bujangan atau belum pernah menikah, dalam hukum pidana Islam sendiri dijatuhi hukuman dera atau pengasingan selama satu tahun, karena pelaku merupakan dalam keadaan ghairu muhsan.

Jika ditinjau dari aspek kualitas jenis hukumannya, maka rajam itu sudah patut digolongkan sebagai salah satu jenis hukuman yang berkadar pemberatan bagi pelakunya.

Anggota masyarakat diharapkan merasa takut lebih, sehingga tidak sampai terjerumus dalam melakukan kejahatan kesusilaan kalau mereka tahu bahwa pelaku terdahulu telah mengalami penjatuhan hukuman dan eksekusi yang luar biasa.²⁰ Sanksi atau hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, dapat dibagi menjadi empat, yaitu :

- 1) Hukuman pokok (*Al-‘uqubatu Al-asliyah*), yaitu hukuman yang asal bagi satu kejahatan.
- 2) Hukuman pengganti (*Al-‘uqubatu Al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum.
- 3) Hukuman tambahan (*Al-‘uqubatu Al-taba’iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok.

²⁰ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan...*, h. 146

- 4) Hukuman pelengkap (*Al-'uqubatu Al-takmilliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.²¹

Dengan melihat paradigma hukum di atas, bahwa hukuman bagi tindak pidana pedofilia yaitu hukuman rajam. Karena dalam pembahasan di atas kasus pedofilia ini merupakan kasus yang akibatnya adalah tidak lain dari pemerkosaan. Hal ini didasari oleh suatu kenyataan bahwa pada kasus pedofilia ini menimbulkan suatu dampak yang tidak sedikit, seperti korban harus mengalami trauma berkepanjangan, karena tidak dapat disangkal bahwa pelaku pemerkosaan adalah orang yang lebih tua dan seharusnya menjadi contoh bagi korban yang masih anak-anak. Dalam hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari al-Quran dan Hadist adalah merupakan satu kode moral dan kode hukum sekaligus, di mana juga merupakan suatu pola yang luas yang mengatur tingkah laku manusia, karena hukum Islam berasal dari otoritas kehendak Allah Swt yang tertinggi.

²¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), h. 28-29.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Menurut Perpu No.1 tahun 2016

1. Pengertian Hukum Positif Tentang Perpu No. 1 Tahun 2016

Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah mengesahkan Perpu No. 1 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri. Penerapan kebiri ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945. Di Indonesia, penerapan untuk kebiri tercantum dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 November 2016. Adapun perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan

hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Pedofilia) yaitu ketentuan Pasal 81.

Ketentuan Pasal 81:¹

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D;
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular,

¹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)

terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumurhidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu)

pasal yakni Pasal 81 A yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
- 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E;
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
- 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
- 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut UU 17/2016, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82 A yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok;
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.²

Disahkannya Perpu No.1 Tahun 2016 dilatar belakangi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak, selain itu juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Pedofilia) belum memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

² *Ibid.*

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Pada kasus kekerasan seksual terhadap anak/ pedofilia persamaannya menurut hukum positif dan hukum pidana Islam sama-sama melarang perbuatan sodomi yang melibatkan anak dibawah umur. Karena sodomi adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela dan melanggar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif, yang tentunya akan dijatuhi hukuman. tapi bentuk tindak pidana pedofilia lebih menekankan pada korban yang masih anak-anak. Larangan tersebut karena dampak yang akan ditimbulkan kepada korban adalah dimana anak tersebut dapat menderita gangguan mental pada jiwa, pendiam, malu akan dirinya, kehilangan gairah pada lawan jenisnya dan biasanya dikucilkan dari masyarakat, padahal mereka itu adalah korban dari perbuatan bejat dari para pedofil. Dan dampak panjangakan melahirkan pedofil-pedofil baru, karena para pedofil akan menumbuhkan pedofil-pedofil baru.

Adapun perbedaan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam diukur dari segi hukuman, pengertian dan syarat.yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi hukuman

Pada hukum Islam menurut, al-Auza'i dan Abu Yusuf menyamakan hukuman sodomi dengan zina, karena menurut mereka dua perbuatan tersebut adalah sama, maka hukumannya pun sama. Pada masa khalifah Umar bin Khattab, beliau menginstruksikan agar seorang pelaku sodomi dibakar hidup-hidup. Namun, karena mendapat kritik keras, lalu hukumannya dirajam bagi yang sudah menikah.yang belum menikah dihukumi dengan cambuk 100x dan pengasingan selama 1 tahun.Kemudian menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia orang yang melakukan tindak pidana sodomi Dalam pasal 423 RUU KUHP tegas disebutkan bahwa batas minimal hukuman terhadap pelaku perkosaan adalah tiga tahun.

Hal ini berbeda dengan sistem yang dianut pasal 285 KUHP yang sekarang masih berlaku, yaitu minimal satu hari.Ancaman hukuman maksimumnya tetap 12 tahun.Pasal 285 KUHP hanya mengandung satu ayat dan mengatur tindak pidana perkosaan secara umum. Disebutkan bahwa ,barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

memaksa seorang wanita atau lelaki bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Selain oral seks dan sodomi, paling tidak masih ada delapan jenis tindak pidana perkosaan lain.

2. Dari segi pengertian

Menurut hukum Islam perbuatan yang dilakukan secara sukarela atau suka sama suka meskipun tidak ada yang merasa dirugikan tetap zinadipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela tanpa kenal prioritas sebab zina diharamkan dalam segala keadaan. Sedangkan hukum positif menganggap perbuatan zina sebagai urusan pribadi yang hanya menyinggung hubungan individu dan tidak menyinggung hubungan masyarakat. Oleh karenanya dalam pandangan hukum positif, apabila zina itu dilakukan dengan sukarela maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman, karena dianggap tidak ada pihak yang dirugikan, kecuali apabila salah satu keduanya dalam keadaan sudah kawin.

3. Dari segi unsur syarat

Pada hukum pidana Islam tindak pidana zina dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya Nash;
- b) Adanya perbuatan;
- c) Pelaku adalah orang yang dapat menerima taklif.

Sedangkan dalam hukum positif suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dikatakan menjadi suatu tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Harus ada kelakuan;

- a) Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang;
- b) Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- c) Kelakuan itu dapat diberikan pada pelaku;
- d) Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Apabila pelaku merupakan pertama kali melakukan tindak pidana tersebut pelaku bisa di jatuhi hukuman yang berat dengan hukuman penjara yang cukup lama. Melainkan apabila pelaku sudah masuk dalam kata-kata predator anak, atau telah melakukan berulang-ulang maka pelaku bisa di jatuhi hukuman yang sangat

berat termasuk hukuman kebiri yang telah disahkan oleh pemerintah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016.

Apabila dilihat hukuman kebiri, dalam pandangan hukum pidana islam maka hukuman kebiri merupakan jenis hukuman dengan bentuk sebagai takzir, karena tidak ada dalam nas Al-quran dan As-Sunnah, karena hukuman kebiri langsung di buat oleh pemerintah yang berdaulat karena terjadi sebuah kegentingan dalam masyarakat. Dalam hal ini peneliti berpendapat hukuman kebiri dalam pandangan hukum pidana Islam boleh/dibenarkan untuk di lakukan selama bisa membuat pelajaran bagi pelaku maupun orang lain.

C. Pandangan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Medan terhadap Perpu No.1 tahun 2016 tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak

Pemberian hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana pedofilia nampaknya tidak mampu mencapai tujuan hukum pidana, yaitu tujuan yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan pencegahan. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya angka kejahatan pedofilia setiap tahunnya.

Ketua LPA Kota Medan, Alihot Sinaga menjelaskan bahwa; “Salah satu alternatif untuk tercapainya tujuan hukum pidana

tersebut diterapkannya hukuman kebiri sebagai bentuk pemberatan hukuman dan rehabilitasi terhadap kelainan seksual yang diderita pelaku .Untuk merespons reaksi dari masyarakat tersebut kemudian pada tahun 2002 negara Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.³ Di dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut ditentukan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat. keluarga, dan orang tua.⁴

Lebih lanjut Alihit Sinaga menjelaskan; “Terkait penerapan untuk kebiri tercantum dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 November 2016 merupakan pilihan dan tindakan yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena selain Indonesia terdapat juga berbagai negara yang menjadikan kebiri sebagai bentuk

³ Wawancara Alihot Sinaga Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Medan, Medan, Tanggal 28 Oktober 2020

⁴ *Ibid.*

hukuman”.⁵ Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman telah diterapkan di berbagai negara, yakni Sembilan negara-negara Eropa, sembilan negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara. Kesembilan negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan sembilan negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan satu negara di Asia Tenggara adalah Korea Selatan.⁶

Pengadilan Korea Selatan telah menjatuhkan vonis lima belas tahun penjara ditambah hukuman kebiri kepada seorang pelaku kekerasan seksual. Si pelaku sudah berulang kali melakukan pemerkosaan terhadap sejumlah remaja perempuan. Kejahatan yang dilakukan oleh pria bermarga Pyo ini tidak hanya berupa pemerkosaan saja, bahkan ia mengancam akan menyebarkan video seks mereka. Selain menjatuhkan hukuman fisik, pengadilan juga

⁵ *Ibid.* Lihat juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

⁶ *Ibid.*

memerintahkan agar catatan kriminal Pyo disebarakan pada publik selama 10 tahun ke depan. Hal ini salah satu upaya untuk membuat jera pelaku dan memunculkan kewaspadaan warga atas kasus kekerasan seksual. Meskipun beberapa negara tersebut di atas telah menerapkan hukuman kebiri, dalam beberapa kajian menerangkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam menerapkannya. Hal ini dikarenakan mereka harus melakukan diagnose terlebih dahulu terkait kesehatan dan implikasi medisnya.⁷

Diagnosis dilakukan oleh psikiater yang berpengalaman dan memiliki latar belakang medis yang benar. Pelaku tindak pidana pedofil perlu diperiksa secara medis dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaku berbuat karena gangguan medis atau tidak, seperti ada tumor di otak, masalah enetik atau kelainan hormon tertentu. Jika tidak ada masalah medis terkaitseksualitas, seorang pedofil perlu diperiksa kesehatan mentalnya. Hal ini untuk mengetahui apakah pelaku memiliki gangguan jiwa terkait seks atau masalah kepribadian sehingga menyalurkan hasrat

⁷ Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, *Menguji Euforia Kebiri : Catatan Kritis Atas Kebijakan Kebiri (Chemical Crastation) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia, 2016), h.14

seksualnya secara tidak wajar. Mengenai prosedur pelaksanaan hukuman kebiri ini adalah sebagai berikut:

- 1) Polisi menyelesaikan berkas perkara dan mendakwa pelaku dengan tuntutan kebiri.
- 2) Di pengadilan, hakim sepakat untuk menjatuhkan hukuman kebiri.
- 3) Setelah hukuman berkekuatan hukum tetap, eksekusi dilakukan di penjara atau rumah sakit yang telah ditentukan oleh pengadilan.
- 4) Ada batas waktu yang ditetapkan dengan dugaan pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Beberapa negara tidak memerlukan persetujuan terhadap pelaku untuk melakukan kebiri bedah atau kimia. Sedangkan di negara-negara lain yang menggunakan tahapan persetujuan hanya meliputi pemberitahuan mengenai efek samping dari hukuman kebiri tersebut.

Di Indonesia, kejahatan pedofilini telah banyak menarik perhatian masyarakat dengan semakin meningkatnya angka kejahatan dan semakin sadisnya perbuatan jahat yang dilakukan.

Muhammad juga menjelaskan bahwa “wacana pemberian tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedophilia pertama kali diusulkan secara resmi kepada publik oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan didukung oleh Menteri Sosial pada Mei 2015. Fenomena kejahatan pedophilia di Indonesia berawal dari kasus Jakarta Internasional School (JIS) yang menimpa siswa, dimana para pelaku secara bersama-sama melakukan kejahatan seksual sejak bulan Februari hingga Maret tahun 2014. Kemudian menyusul kasus berikutnya kasus pembunuhan Angeline yang jasadnya ditemukan pihak kepolisian pada tanggal 10 Juni 2015 di pekarangan rumah Margareth. Angeline ditemukan terkubur pada kedalaman setengahmeter, dengan pakaian lengkap dan tangan memeluk boneka. Tubuhnya dililit seprei dan tali.⁸

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa “kasus berikutnya mengenai kejahatan yang pernah dilakukan kaum pedophilie ialah pada kasus kematian Putri Nur Fauziyah, bocah berusia sembilan tahun ini menjadi korban kejahatan seorang pedopilyang merupakan tetangganya. Sebelum kematiannya dia sering mengalami

⁸ Wawancara Muhammad Nur Husein Daulay, Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Medan, Medan, Tanggal 29 Oktober 2020

kekerasan seksual, jasadnya ditemukan pada tanggal 02 Oktober 2015 dalam keadaan telungkup dalam kardus dengan mulut tersumpal kaos kaki dan telanjang, mulut dan hidungnya berdarah, posisi badannya meringkuk dengan kedua kaki menjepit kedua tangan dan kepalanya terpelengkuk ke bawah. Menyusul berikutnya kasus pemerkosaan dan kematian yang menimpa Yuyun yang terjadi pada tanggal 02 April 2016 di Bengkulu. Masyarakat marah dan resah dengan kematian gadis empat belas tahun itu, setelah diperkosa oleh empat belas pemuda berusia enam belas hingga dua puluh tiga tahun. Apalagi, sepuluh di antara empat belas pelaku hanya dituntut sepuluh tahun penjara. Oleh karenanya, keinginan masyarakat untuk segera menetapkan hukuman kebiri semakin kuat. Akibat dari kejahatan pedophilia ini dapat mempengaruhi kecerdasan otak, yakni dapat menghilangkan keseimbangan akal, kedunguan dan kesesatan pikiran, serta menjadikan masyarakat merasa tertekan akibat rasa takut dan khawatir karena perilaku mereka yang berani melakukan kejahatan pada anak yang masih di bawah umur. Sehubungan

dengan hal itu, pedofilia merupakan suatu tindakan yang berhubungan dengan masalah seksual”.⁹

Dengan begitu rujukan satu-satunya adalah terdapat pada Bab XIV KUHP tentang kesusilaan. Satu-satunya pasal dalam KUHP yang hampir dijadikan dasar hukum dari pedofilia adalah pasal 294 ayat (1) yang rumusannya sebagai berikut ; Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak pemeliharannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayai kepada dirinya untuk ditanggung, di didik atau di jaga, atau dengan bujang atau orang sebahawnya yang belum dewasa di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Tindak pidana dimasukkan dalam ketentuan pidana di ataur dalam pasal 294 KUHP tersebut hanya terdiri dari unsur-unsur objektif saja yaitu ;

- 1) Barang siapa.
- 2) Melakukan tindakan-tindakan kesusilaan.
- 3) Anak sendiri, anak tiri, atau anak asuh atau anak angkat yang belum dewasa yang pengurusannya, pendidikan atau penjagaanya dipercayakan kepada pelaku.
- 4) Seorang pembantu atau bawahannya.

⁹ *Ibid.*

Unsur obyektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 294 KUHP ayat (1) tersebut yaitu unsur barang siapa, hal ini menunjuk pada orang yang apabila orang tersebut terbukti dari semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan, dalam ketentuan pasal tersebut maka ia dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Unsur obyektif yang kedua yaitu melakukan tindakan kesusilaan dalam ayat ini, yang dimaksud yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang kesemuanya itu berada di dalam lingkungan keinginan dari nafsu birahi. Unsur ketiga mengenai Anak sendiri, anak tiri, atau anak asuh atau anak angkat yang belum dewasa yang pengurusannya, pendidikan atau penjagaanya dipercayakan kepada pelaku, baik itu pendidikan atau dalam kesehariannya itu tanggungan pelaku. Hal ini kiranya cukup jelas. Mengenai unsure pelaku terakhir yaitu pembantu atau orang bawahannya yang belum dewasa.¹⁰

Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak

¹⁰ P.A.F Lamintang, *"Delik -Delik Khusus, Tindak Pidana Melanggar Norma -Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan"*, (Bnadung : Mandar Maju, 1990), h. 195-199.

dianggap belum efektif sehingga Pemerintah mengesahkan PerpuNo.1 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri yang dalam hal ini tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam.¹¹

¹¹ Wawancara Alihot Sinaga Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Medan, Medan, Tanggal 28 Oktober 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan bab demi bab, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana di bawah ini :

1. Penerapan untuk kebiri tercantum dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 November 2016. Adapun perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Pedofilia) yaitu ketentuan Pasal 81 ayat 7 yaitu: Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
2. Apabila pelaku merupakan pertama kali melakukan tindak pidana tersebut pelaku bisa di jatuhi hukuman yang berat dengan hukuman penjara yang cukup lama. Melainkan

apabila pelaku sudah masuk dalam kata-kata predator anak, atau telah melakukan berulang-ulang maka pelaku bisa di jatuhi hukuman yang sangat berat termasuk hukuman kebiri yang telah disahkan oleh pemerintah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016. Pandangan hukum pidana Islam terhadap Perpu No.1 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, maka hal ini perlu dilihat bahwa hukuman kebiri, dalam pandangan hukum pidana Islam merupakan jenis hukuman sebagai takzir, karena tidak ada dalam nas Al-quran dan As-Sunnah, karena hukuman kebiri langsung di buat oleh pemerintah yang berdaulat karena terjadi sebuah kegentingan dalam masyarakat.

3. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah mengesahkan PerpuNo.1Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri yang dalam hal ini tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pijakan tentang bagaimana sesuatu hukum itu dapat tercipta, dengan memikirkan segala aspek yang mungkin akan terjadi kedepannya. Terkait hukuman keberi sebagaimana yang dimuat dalam Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang perlindungan anak terdapat beberapa aspek yang harus dibenahi, diantra aspek yang perlu untuk di benahi pertama dalam penetapan hukuman keberi pemerintah harus melihat secara detail tentang hukuman tersebut, kedua pemerintah juga seharusnya memikirkan untuk melihat dampak dari hukuman tersebut bagi pelaku dan korban, dan ketiga, pemerintah bisa memikirkan dengan baik dalam merumuskan sebuah kebijakan perlu adanya adanya dasar yang mendasari dengan kuat dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Beni Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008).

Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta : Teras, 2009).

Dib, Mushtafa Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Noura Books, 2012).

Djazuli, A. *Fiqih Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

Faizin, Abdul, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polres Salatiga tahun 2004-2006)*. (Skripsi: Jurusan Syariah STAIN Salatiga, Tahun 2010).

Hakim, Lukman Harahap, *Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia di Yogyakarta*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Hikmat, Mahi. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

<http://id.wikipedia.org/wiki/pedofilia>

Lamintang, P.A.F “*Delik -Delik Khusus, Tindak Pidana Melanggar Norma -Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*”, (Bnadung : Mandar Maju, 1990).

Munnim, Ngabdul, *Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)

Rahman, Abdur. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rienika Cipta, 2007).

Sahrani, Tihami, dan Sohari, *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2009).

Supardi, Sawatri S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung:PT. Refika Aditama, 2005)

Syarifudin, Amir *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Wahid, Abdul Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011).

Wardi, Ahmad Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Widodo, Supriyadi Eddyono, dkk, *Menguji Euforia Kebiri : Catatan Kritis Atas Kebijakan Kebiri (Chemical Crastation) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia, 2016).